

ABSTRAK

KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN : STUDI ATAS GURU BERSERTIFIKASI DI SMP NEGERI 1 KOTARIH

SRI HASTUTI BR.SARAGIH
NPM : 71190211086

Sertifikat guru dan dosen sebagai mana pengakuan terhadap status profesional bagi seorang guru. Adapun undang-undang yang tertera di undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan di Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bawasannya sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada guru dan dosen.

Kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan pertama yang di rancang oleh pemerintah yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas dan mutu pendidik melalui pemberian sertifikat pendidik di sertai tunjangan profesi pendidik. Adapun penetapan kebijakan ini serta-merta menjamin secara signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan diindonesia.

Penelitian ini berbentuk kualitatif dan adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sertifikasi guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kotarih, yang di dasari pada tujuan utama kebijakan ini sebagai menyejahterakan guru, melatih peningkatan guru, dan melatih kemampuan seorang guru sebagai guru yang profesional. Kebijakan dalam sertifikat guru juga dapat meningkatkan mutu pembelajaran pada guru.

Hal ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan atau evaluasi pembelajaran secara konsisten dengan prosedur yang diharapkan. Dan dapat dilihat dari banyaknya guru yang sudah bersertifikasi di SMP Negeri 1 Kotarih tersebut ada 15 Orang. Dengan banyaknya guru yang telah bersertifikasi dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi seorang murid di SMP Negeri 1 Kotarih. Kebijakan sertifikasi guru mampu memberikan implikasi terhadap peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Kotarih, hal ini ditunjukan dengan adanya hubungan sosial yang terjalin secara individu atau pun kelompok antara guru sehingga menjadi guru memiliki pergaulan sosial dengan masyarakat.

Kata kunci : Kebijakan, Sertifikasi Guru, Pendidikan